

SIKAP ETIS PENDIDIK KEPADA SISWA DALAM MEMBENTUK GLOBAL CITIZEN BERDASARKAN PANCASILA

Yasokhi Gea

Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya Palembang

Email: gheayas10@gmail.com

Abstract—*Ethical attitude is the attitude of an educator showing, teaching, and theorizing in accordance with the norms and values of Pancasila. An educator is able to theorize correctly and also be able to run the theory in his life (teaching theory) and (doing theory). Both of these must be in harmony with the profession as an educator to form learners who have high tolerance values in the midst of the plural. Students is a generation of nations that build, improve and promote the nation. So an educator should teach the values of Pancasila so that the nation's generation has an attitude of nationalism by appreciating every difference (religion, race, language, culture) in Indonesia. With the formation of an attitude through education, then pluralism at the national level of course also every action undertaken in it will affect the action in shaping the world peace (global citizenship) in the middle of the world. This distinction must always be addressed properly in order to avoid conflicts and disunity. One of the steps that must be taken to apply the values of Pancasila as the basic ideology of the state by not forgetting the basic state of the 1945 Constitution*

Keywords— *Ethical Attitudes, Pancasila, Educators, Global Citizens, Students.*

Abstrak— *Sikap Etis merupakan sikap seorang pendidik memperlihatkan, mengajar, dan berteori sesuai dengan norma dan nilai-nilai Pancasila. Seorang pendidik mampu berteori dengan benar dan juga mampu menjalankan teori itu di dalam kehidupannya (mengajar teori) dan (melakukan teori). Kedua hal ini harus selaras dengan profesi sebagai seorang pendidik untuk membentuk siswa yang memiliki nilai toleransi yang tinggi di tengah-tengah perbedaan (plural). Siswa merupakan generasi bangsa yang membangun, memperbaiki serta memajukan bangsa. Maka seorang pendidik seharusnya mengajar nilai-nilai Pancasila agar generasi bangsa memiliki sikap nasionalisme dengan menghargai setiap perbedaan (agama, ras, bahasa, budaya) di Indonesia. Dengan terbentuknya sikap melalui pendidikan maka pluralisme di tingkat nasional tentunya juga setiap tindakan yang dikerjakan di dalamnya akan mempengaruhi tindakan dalam membentuk perdamaian dunia (global citizenship) di tengah-tengah dunia. Perbedaan inilah yang harus terus disikapi dengan baik agar tidak terjadi konflik dan perpecahan. Salah satu langkah yang harus ditempuh menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dengan tidak melupakan dasar negara UUD 1945.*

Kata Kunci— *Sikap etis, Pancasila, Pendidik, Global Citizen, Nara Didik*

PENDAHULUAN

Di era post modern sekarang ini (abad XXI), sangatlah penting peranan ilmu pengetahuan dalam membentuk Global Citizen karena manusia adalah makhluk yang bersosial di dalam menjalankan dan meningkatkan hidup toleransi. Pokok permasalahan tampaknya mengarah pada perbedaan religius, yang seolah-olah memperlihatkan keunggulan setiap pemeluknya (*superior of religus*),

tetapi selain itu juga keberagaman di Indonesia (baik dari segi suku, budaya dan bahasa) kadang terjadi konflik yang sama dan menganggap bahwa di dalam budaya tertentu memperlihatkan eksistensi yang lebih dibandingkan dengan suku dan budaya lainnya.

Bahkan dalam penjelasan berita BBC oleh Lestari (2016) menjelaskan bahwa temuan peneliti LIPI menyebutkan penyebaran paham radikal

meningkat dikalangan anak muda setelah reformasi. Hal yang sama juga dipaparkan dalam berita Detik News (2018) bahwa mereka yang toleran terhadap kelompok yang tidak disukai pada survei Oktober 2017 ini sebesar 0,8 persen, naik sedikit dari survei 2016 sebesar, 0,7 persen. Sedangkan yang bersikap netral ada 42,1 persen, serta turun dari 2016, sebesar 48,3 persen. Di dalam penjelasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan dua hal yang menyebabkan hal itu bisa terjadi adalah pertama, reaksi atas ketidakberdayaan dalam menghadapi ketidakadilan melalui jalur normal; kedua, faktor wawasan dan pengetahuan yang sempit hingga berdampak pada klaim kebenaran. Karena wawasan yang sempit, menganggap bahwa dirinya paling benar dan pintar, akibatnya menyalahkan pihak lain dan menolerir kekerasan. Maka yang sangat diperlukan adalah penguatan pendidikan dan memiliki wawasan yang luas, seperti dijelaskan oleh Far (1984: 5) mengemukakan, "*reading is the heart of education*" yang artinya membaca merupakan jantung pendidikan dan sebagai pembentukan fondasi sikap toleransi. Melihat permasalahan yang terjadi di atas tampaknya memperlihatkan bahwa sikap toleransi ini sebenarnya berakar dari pendidikan yang sempit atau tidak berwawasan. Akibatnya melakukan tindakan – tindakan yang membenarkan diri berdasarkan konsep yang dimiliki setiap individu. Gambaran-gambaran ini sebenarnya tidak searah dengan UUD 1945 dan berdasarkan dengan ideologi bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila. Peranan pendidikan sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan intoleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia khususnya dan yang ada di kalangan dunia. Pendidikan yang berwawasan mampu berpikir secara benar apabila ilmu yang dipelajari sejalan dengan tindakan yang dilakukan. Masalah yang sama juga dipaparkan oleh Kompas.Com (Februari 2017) menjelaskan bahwa Setara Institute Halili mencatat ada 151 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 201 bentuk tindakan yang tersebar di 26 provinsi se-Indonesia. Faktor tersebut disebabkan oleh terkuat dan menyebarnya kelompok-kelompok intoleran, lemahnya Kebijakan dan regulasi negara tunduk atau lemahnya negara kepada kelompok

intoleran. Akibat sikap intoleransi dapat menyebabkan perpecahan sebuah komunitas, kesatuan negara, bahkan kerukunan berbangsa dan bernegara. Melihat permasalahan-permasalahan di atas. Pokok permasalahan yang diungkapkan adalah bagaimana sikap etis pendidik dalam mendidik sehingga dapat terbentuk nasionalisme dan global citizen berdasarkan Pancasila.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai etis berdasarkan Pancasila kepada siswa, meningkatkan sikap toleransi keberagaman, dan menerapkan sikap-sikap nasionalisme sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia.

SIKAP ETIS PENDIDIK

Dalam penjelasan ini terlebih dahulu kita perhatikan asal kata dari etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti *basic human moral attitude* (sikap dasar moral manusia) (Sinamo, 2012: 53). Sedangkan kode etik tenaga kependidikan yang dirumuskan pertama kalinya oleh *The National Education Association* (NEA) pada tahun 1929, yaitu *a code ethis for teaching Profession* yang sebenarnya merupakan organisasi profesional dalam bidang pendidikan yang ada di Amerika (Bafadal, 2004:5) Sikap untuk melaksanakan etika disebut dengan etis. Etis berarti sesuai dengan norma-norma, cara dan nilai-nilai yang dipandang baik di dalam lingkungan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Arti etik juga dijelaskan oleh William Lillie bahwa: *ethis as the normative science of conduct of human being living in societies* (1996:1-2).

Nilai yang baik itu diprjelas oleh John Stuart Mill bahwa suatu tindakan adalah baik apabila ia mendatangkan "kebaikan yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang" (*the greatest good for the greatest number*) (Darmaputera, 2016: 36). Berkaitan dengan definisi di atas maka dapat di artikan bahwa sikap etis adalah kesuaian tingkah laku pendidik dalam melaksanakan sistem proses belajar mengajar.

Jadi, membahas tentang etika harus membicarakan jati diri manusia sebagai yang bermoral dan berkarakter baik. Sebagai manusia yang memiliki moral dan berkarakter baik

memperlihatkan perbedaan dengan ciptaan lain (makhluk, binatang dan juga tumbuhan).

Pendidik memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Di dalam Perpres itu disebutkan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan melibatkan antara satu pendidikan baik secara formal maupun non formal.

Di dalam Perpres PPK alasan dibentuk salah satunya adalah membangun dan membekali siswa sebagai generasi emas pada tahun 2045 dengan memiliki jiwa Pancasila yang beretika guna menghadapi dinamika perkembangan zaman dan teknologi (Perpres No.87 tahun 2017). Jadi fokus utama adalah sikap etis yang berjiwa Pancasila yang harus dilaksanakan oleh pendidik dalam mendidik.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila salah satunya adalah point ketiga "Persatuan Indonesia" Kesatuan dan Persatuan dapat terwujud di dalam pengajaran yang dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dan UUD tahun 1945. Persatuan merupakan untuk menyatukan pikiran, akal, bahkan kekuatan untuk mencapai sebuah target khususnya dalam membentuk pendidikan dan toleransi di dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini sangat penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia seperti dipaparkan oleh Kristiawan bahwa harus adanya *building education* (Kristiawan, 2015:11). Bangunan pendidikan ini dapat diterapkan dari sekolah melalui pendidik. Demikian juga dalam Pepres menegaskan bahwa sebagai seorang pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kesadaran dalam menciptakan suasana yang harmonis di dalam ketiga aspek (hati, rasa dan pikir) karena ketiga hal ini saling memiliki relevansi yang tidak dilepaskan. Pada pasal 5 ayat kedua dituliskan bahwa keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan. Lingkungan yang dimaksudkan adalah lingkungan atau konteks pendidikan yang ada di Indonesia yang plural dari Sabang sampai Merauke. Fokus utama adalah

kepada pendidik yang memberikan didikan kepada siswa dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Sikap etis pendidik yang dimaksudkan adalah dengan melakukan proses belajar mengajar dengan mengutamakan pembinaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa harus mampu diimplementasikan eksistensinya di Indonesia. Di dalam Pancasila memuat nilai-nilai toleransi untuk tetap berjalan pada kesatuan dan persatuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa berarti Pancasila menjadi fondasi ide, gagasan dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satu contohnya adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa" Indonesia memiliki berbagai suku dan budaya. Jadi setiap suku ini memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Maka di dalam perbedaan inilah pendidik mampu memberikan kontribusi untuk memberikan penjelasan, tindakan yang dapat diteladani. Peserta didik harus menanamkan pemahaman untuk saling menghargai dan toleran terhadap setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Hal ini sangat penting karena merupakan tugas seorang pendidik.

Di dalam PERMENDIKNAS No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Fungsi pendidik terdapat di dalam poin D dan E pasal 20 UU No. 14 Tahun 2005 juga tentang Guru dan Dosen, serta pada poin a, b dan c Pasal 40 ayat (2) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik dan juga nilai-nilai agama dan etika (Permendiknas, 2007). Di dalam penjelasan ini jelas bahwa sebagai seorang pendidik mampu menyatakan kode etik. Kode etik yang merupakan standar pelaksanaan pembelajaran di dalam pendidikan. Hal ini sejalan yang dikatakan oleh Zacky Ar (2016:14) bahwa pelaksanaan pendidikan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memajukan pengetahuan yang membawa perubahan dan sikap toleransi terhadap berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam penjelasan Zacky Ar menuturkan bahwa sebagai seorang pendidik mampu mengaplikasikan pengajarannya sesuai dengan

tindakan. Artinya bahwa teori dengan praktik itu harus sejalan dan tidak berseberangan. Dengan melihat keseuaian antara teori dengan praktiknya maka siswa mampu mengamalkan dan melakukannya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara Indonesia.

Penjelasan yang senada juga dipaparkan oleh Driyarkara yaitu harus memanusiaikan manusia muda (Sidjabat, 2009: 102) artinya sikap etis inilah yang harus dimiliki oleh pendidik dalam mendidik. Dapat juga dibandingkan dilihat di dalam penjelasan Wolterstorff bahwa jika ingin mempengaruhi cara setiap siswa (seseorang) bertindak, sebaiknya bertindak seperti demikian (Wolterstoff, 2010: 103). Jadi, sikap etis itu adalah memanusiaikan manusia sesuai dengan nilai luhur kebangsaan, menjadi teladan dalam bersikap (bertingkah laku), dan menghargai HAM setiap siswa di dalam sebuah sekolah.

Dari hal sikap etis inilah siswa dapat menilai dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan ilmu yang diperoleh di dalam sekolah atau lembaga pendidikan.

PANCASILA DAN GLOBAL CITIZEN

Pelaksanaan pendidikan di berbagai lembaga sekolah/pendidikan tampaknya harus diselaraskan berdasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Menurut Sunoto berpendapat bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pandangan hidup (ideologi) dan menjadi alat pemersatu bangsa (instrument) (Sunoto, 1991:50). Melalui pendidikan dapat menghasilkan manusia yang cerdas, berkualitas, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan demokratis. Pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan fondasi dalam melaksanakan Sistem Pendidikan Nasional dalam UU.No. 20 tahun 2003. Melalui nilai yang dimiliki Pancasila untuk dapat diaplikasikan di dalam pendidikan Indonesia.

Berikut ini ada beberapa nilai pendidikan Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. *pertama-tama* perlu dilihat bahwa nilai yang

dimaksudkan disini adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mencakup kebebasan manusia dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. *Kedua* bahwa setiap warga negara adalah manusia yang harus dimanusiawikan dan tidak mencuri hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. *Ketiga* adanya nilai kesatuan yang bersifat saling bahu-membahu, gotong royong bersama, sehati, setujuan dan selaras dalam mengamalkan nilai-nilai yang etis di dalam bermasyarakat dan bernegara. *Keempat* bahwa nilai Pancasila harus merakyat dengan seorang pemimpin yang mampu mengarahkan bangsa Indonesia ke depan pintu pembangunan dan perkembangan demi mencapai tujuan bangsa berdasarkan UUD 1945. *Kelima*, adanya nilai pemerataan sosial di dalam kalangan pendidikan, masyarakat dan negara.

Dari nilai-nilai ini merupakan landasan untuk mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang strategis dalam melaksanakan penguatan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai dasar (falsafah) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Banks, 2008:134). Sejalan dengan itu juga Winarno menuturkan bahwa nilai adalah penghargaan atau kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi salah satu faktor penentu tingkah laku manusia sebab segala sesuatu itu berguna, diyakinkan dan dapat memberikan hasil yang memuaskan serta memberikan keuntungan dan kesenangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Winarno, 2007:3)

Dengan pendidikan yang diterapkan di setiap lembaga pendidikan atau sekolah secara *step by step* akan mengarah kepada sikap menghargai dalam perbedaan budaya, ras dan agama yang ada di Indonesia. Pendidik mampu mengintegrasikan antara nilai ideologis negara dengan nilai beretika di dalam tatanan sosial masyarakat. Peranan pendidik tidak hanya memberikan materi pembahasan yang dapat dikaji dan diberikan di dalam proses belajar mengajar. Tetapi juga peranan pendidik terlibat dalam menangani permasalahan-permasalahan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan. Baik di dalam pendisiplinan siswa sampai kepada pertanggung jawaban terhadap proses belajar mengajar secara kontinu. Salah satu penataan yang harus dilakukan

oleh pendidik adalah dengan menerapkan nilai-nilai kekeluargaan dan sikap saling menghargai dan menyapa satu dengan yang lain seperti menerapkan sistem bersalaman di dalam komunitas sekolah itu sendiri.

Apabila terjadi sikap menghargai yang dimulai dalam komunitas sekolah kemungkinan pendapat Cogan yang menentukan bahwa ada tiga permasalahan yang dihadapi negara-negara seluruh dunia yang dapat dikurangi. Penjelasan Cogan bahwa bahwa: *pertama*, berkembangannya ekonomi global; *kedua*, semakin pesatnya pengetahuan teknologi dan komunikasi; *ketiga* meningkatnya populasi penduduk dunia dengan munculnya permasalahan lingkungan (Cogan, 1998).

Sedangkan menurut Seda dan Manan (2011) menuturkan bahwa akan adanya keresahan akan lunturnya nilai-nilai nasionalisme dalam konteks proses periodisasi globalisasi. Permasalahan demikian tampaknya disebabkan oleh konsep atau pemahaman terhadap sikap nasionalisme yang senantiasa dikaitkan dengan negara dan bangsa. Maksud Sedan dan Manan bahwa sesungguhnya semua itu harus didasarkan pada konsep komunitas atau secara individu untuk dapat membentuk sikap toleransi keberagaman yang ada sehingga realitanya memperlihatkan bahwa setiap komunitas mampu menghargai perbedaan.

Di dalam perkembangannya, dari nilai-nilai Pancasila inilah terwujud sikap toleransi terhadap keberagaman, budaya, suku dan bahasa. Hal ini masih di dalam ruang lingkup nasional, menuju ruang lingkup bersifat global harus memang dimulai dari dalam (nasional) dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Diogenes bahwa "*citizen of the world*" (Morais & Ogden, 2010:1-22). Sedangkan arti dari global citizenship adalah *manifestaed in behaviour thas does justice to the principles of mutual dependency in the world* (Carabain, 2012: 30). Pusat perhatiannya adalah individu yang memberikan kontribusi dalam menciptakan toleransi secara mendunia. Sama halnya dalam penjelasan Dower bahwa *focus on the individual contributions citizen to creat a better world* (Dower, 2010: 553: 567). Artinya bahwa ada fokus yang diharuskan untuk dikerjakan,

yaitu memberikan sumbangsih untuk meningkatkan global citizen baik pikiran, tenaga maupun kesediaan hati dalam melaksanakan perdamaian antar bangsa dan negara. Maka di dalam pendidikan ini diperlukan pendidik, nara didik dan peranan keduanya dalam membentuk global citizen.

PENDIDIK, SISWA DAN GLOBAL CITIZEN

Pendidik adalah seorang yang menjadi panutan sebab itu seorang pendidik seharusnya memiliki standar kualitas pribadi yang dapat diperhatikan dan dijadikan teladan seperti sikap untuk bertanggung jawab, memiliki wibawa, mandiri dan hidup disiplin. Dengan tanggung jawab yang dimiliki maka pendidik mampu mengetahui, serta memahami nilai, norma moral dan sosial di dalam lingkungan hidup baik di sekolah maupun di masyarakat sekitarnya. Berkaitan dengan itu, Mulyasa menjelaskan bahwa: pendidik harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat (2007: 37). Dari kualitas inilah seorang pendidik dapat memberikan keteladanan kepada siswa untuk memperlihatkan karakter atau sikap etis sebagai seorang pendidik. Pertama-tama bahwa pendidik harus memahami nilai (baik buruk maupun nilai baik) yang berlaku di dalam negara Indonesia. Salah satu perbandingannya adalah negara Korea Selatan. Negara ini hanya memiliki satu bahasa dan tidak beragam seperti negara Indonesia. Jadi seluruh negara Korea Selatan hanya menggunakan satu bahasa saja. Sehingga di dalam pelaksanaan belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik sangat mudah dalam berkomunikasi. Jika dibandingkan dengan negara Indonesia yang bermacam bahasa maka sistem ini sangat jauh berbeda. Indonesia bermacam bahasa dan di dalam proses belajar mengajar harus menggunakan bahasa Indonesia dan sebaiknya tidak menggunakan bahasa daerah atau bahasa suku. Dari cara inilah setidaknya pola dan pemahaman siswa mampu meneladani dan menghargai perbedaan yang ada dengan menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Pada isi Sumpah Pemuda juga dituturkan bahwa: kami bangsa Indonesia mengaku berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Cara ini sangat

penting seorang pendidik mempergunakan bahasa Indonesia dan tidak mempergunakan bahasa daerah di dalam proses belajar mengajar. Alasan menggunakan bahasa Indonesia disebabkan di dalam satu ruang kelas tidak mungkin hanya satu suku (artinya di dalam kelas setidaknya terdiri dari beberapa suku yang berbeda). Jadi, sebaiknya penggunaan bahasa harus digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Mulyasa juga mempertegas bahwa seorang pendidik harus memiliki model dan teladan. Model dan teladan itu adalah memiliki bicara dan gaya bicara, yaitu penggunaan bahasa sebagai bentuk alat untuk berpikir (Mulyasa, 2007:45-46).

Setiap siswa memiliki pola pikir yang berbeda, demikian juga dengan penilaiannya terhadap pendidik di dalam proses belajar-mengajar dan bermasyarakat. siswa melihat, belajar dan meneladani apa yang dikerjakan oleh pendidiknya. Berarti hal ini sangat berpengaruh besar peranan pendidik dalam menentukan pola pikir (*world view*) siswa terhadap dunia ini. Salah satu realita adalah kadang seorang siswa meniru dan mengimplementasikan cara-cara seorang pendidik ketika berbicara, gaya berpakaian bahkan sampai kepada cara ketawa pun kadang hal itu dapat diikuti oleh siswa. Maka pendidik sebaiknya memperlihatkan karakter yang dapat membangun perkembangan siswa dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang dapat mengarahkan pikiran siswa kepada sikap saling menghargai keberagaman yang ada di Indonesia.

Siswa belajar dari guru atau seorang pendidik di mana siswa belajar. Memang selain dari sikap beretika, seorang pendidik juga mampu memiliki wawasan yang luas dibandingkan dengan siswanya. Pengetahuan yang luas, pengalaman, dan talenta-talenta lain yang dapat dipelajari oleh siswa. Pengetahuan itu mencakup dapat mengikuti perkembangan teknologi dan dapat mengoperasikan teknologi untuk dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Artinya bahwa seorang pendidik pengetahuannya tidak hanya terbatas di dalam beretika saja melainkan menyangkut tentang pemahaman terhadap dunia luar (IPTEK) dan globalisasi yang semakin berkembang. Pendidik

diharapkan untuk mampu menguasai Iptek agar dapat mendukung kegiatan proses belajar mengajar.

KAJIDAH SIKAP ETIS

Di dalam melaksanakan pendidikan tentu adanya yang mejadi prinsip yang harus dimiliki dengan tujuan untuk melihat kekonsistenan hidup seorang pendidik di dalam melaksanakan pendidikan atau pengajaran di sekolah. Menurut Sinamo ada beberapa kaidah yang harus dimiliki seorang pendidik adalah: pertama, menghormati hak-hak orang lain; kedua, jangan merugikan atau mencelakakan orang lain; ketiga bersikap adil terhadap semua manusia dan memberikan pelayanan yang baik bagi siswa atau masyarakat (Sinamo, 2012: 58). Hal ini selaras dengan landasan negara Indonesia pada point kedua bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan sikap saling menghormati maka seseorang mampu berjiwa luhur dan mulia (Borrong, 2011: 15).

Seorang pendidik dapat menerapkan kaidah etis demi membangun sikap toleransi keberagaman yang ada di Indonesia. artinya bahwa seorang pendidik sebenarnya melalui pengajaran yang diajarkan di sekolah dapat membuka cakrawala dan pemahaman siswa untuk saling menghargai dan memiliki rasa dan empati dan sikap etis terhadap perbedaan yang ada di Indonesia. Untuk mencapai kaidah-kaidah ini baik pengajar (pendidik) dan nara didik memiliki pengetahuan yang dapat menghargai perbedaan yang ada. Sehingga dapat mengurangi kefanatikan, sikap tidak menghargai, sikap tidak bermoral dan sikap merendahkan orang lain karena menganggap setiap individu lebih superior dibandingkan dengan orang lain.

PENERAPAN NILAI PANCASILA

Untuk dapat melakukan menerapkan nilai-nilai Pancasila maka pendidik melakukan:

Pertama, menanamkan nilai-nilai religius. Setiap religi harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan di dalam pengajaran sekolah. Nilai ketuhanan ini tidak terlepas di dalam ideologi negara, Pancasila dan juga UUD 1945. Nilai religius setiap religi harus mengajarkan nilai-nilai toleransi dan sikap saling menghargai. Maka sikap etis yang harus dimiliki oleh pendidik adalah mengajarkan nilai religius secara tepat berdasarkan

kebenaran dengan tidak terlepas dari dasar negara Indonesia. Dengan menanamkan nilai religius setiap siswa dengan prosesnya akan dapat menghargai dan melakukan toleransi dari dalam (nasional) sampai kepada luar (global/universal).

Kedua, menerapkan pengajaran pendidikan *homo social* atau dapat diartikan sebagai manusia yang bersosial. Sistem ini juga tidak terlepas dari ideologi bangsa Indonesia point kedua. Sikap sosial ini adalah sikap untuk dapat bersosial dan menjalin relasi. Hasilnya tidak terjadi inklusivisme. Inklusivisme Dalam KBBI offline diartikan bahwa paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Apabila ini terjadi maka kemungkinan tidak terjalin hubungan sosial di dalam masyarakat. Maka sikap yang harus dikerjakan oleh pendidik adalah dengan menjalin kerja sama di dalam proses belajar mengajar. Salah satu contoh adalah menerapkan sistem kelompok belajar. Siswa diajar untuk memiliki sikap sosial yang baik dan saling rendah hati. *Ketiga*, meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan. Salah satu contohnya adalah Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya Palembang (STTSP). Salah satu sekolah yang terletak di desa Pangkalan Benteng, Banyuasin. Memiliki banyak siswa yang beragam dari berbagai suku dan bahasa. Bahkan disatukan di dalam satu asrama. Untuk mencapai kesatuan dan persatuan itu, pendidik bersikap netral dalam menanggapi masalah dan tidak berpihak di salah satu pihak. Artinya kebenaran itu perlu diterapkan sesuai dengan realita yang ada. Peranan pendidik dalam hal ini adalah menerapkan rasa solidaritas kebangsaan dengan melibatkan semua nara didik untuk dapat ambil bagian di dalam pelaksanaan kesatuan bangsa dan mempererat hubungan kesatuan. Penjelasan ini juga ditegaskan oleh Kristiawan bahwa perlu membangun hubungan yang kuat demi membangun karakter-karakter yang baik (Kristiawam, 2017: 295). Sikap solidaritas harus dikembangkan di dalam sekolah. Sehingga tidak terjadi *bullyng* dan olok-olok terhadap pihak-pihak tertentu. *Keempat*, mengajarkan pemerataan Hak Azasi Manusia (HAM) di dalam proses belajar mengajar. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk memanusiakan manusia sebagaimana UU tentang HAM pada pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga

negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Nasution, 1993: 314). Artinya bahwa setiap warga negara berhak dan memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. *Kelima*, mendidik dengan menerapkan rasa empati, simpati dan adil agar setiap siswa mampu merasakan dan berempati terhadap setiap orang. Sikap ini harus dimulai dari dalam sekolah dengan melakukan pengajaran. Tujuannya agar siswa dapat merasakan dan melakukan sikap nasionalisme yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sehingga dengan sikap yang tertanam di dalam setiap pribadi siswa dapat menghasilkan siswa yang bertanggung jawab, beretika, memiliki jiwa solidaritas dan menghargai setiap HAM.

Berdasarkan hasil pengamatan, kajian pustaka dan pendeskripsian maka dapat ditemukan bahwa sikap etis pendidik kepada siswa dalam membentuk global citizen adalah, yaitu:

SIKAP PENDIDIK

Orientasi di dalam melaksanakan pendidikan adalah tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (tercantum di dalam UUD 1945). Untuk mencapai tujuan pendidikan dan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan UUD 1945 maka ada seorang pelaksana atau disebut dengan pendidik. Pendidik memiliki peranan penting di dalam meningkatkan sikap toleransi keberagaman. Bukan hanya saja melaksanakan pengajaran sesuai dengan bidang atau profesi masing-masing, melainkan ikut berpartisipasi-aktif di dalam menjalankan pendidikan ke arah yang baik dan sistematis. Pendidik melaksanakan tugas mengajar di setiap sekolah sedangkan yang dididik itu meresapi atau mengalami sendiri setiap proses pembelajaran tersebut. Pendidik yang baik mampu mendidik dan menghasilkan siswa yang berkualitas, beredukasi dan memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Dengan itu, pendidik mampu menjalankan tugas sebagaimana di yang tercantum di dalam UUD 1945. Fokus pendidik bukan juga hanya terletak pada ruang lingkup sekolah, melainkan pendidik mampu mengimplementasikan butir-butir Pancasila di dalam kehidupannya. Tujuan pendidikan yang dikerjakan pendidik adalah menghasilkan siswa

yang mampu merespon dan mengendalikan permasalahan dengan baik. Hal ini memang didukung oleh Paulo Freire bahwa pendidikan itu bertujuan untuk membuat manusia menjadi transitif, yaitu suatu kemampuan menangkap dan menanggapi masalah-masalah lingkungan serta kemampuan berdiskusi kepada segala isi di dunia ini (Pidarta, 2013: 18-19). Dalam hal ini ada satu pengharapan bahwa sebagai pendidik mampu mengerjakan bagiannya sebagai pendidik. Membawa siswa kepada hal-hal yang realitas di dalam menanggapi permasalahan keberagaman yang ada di Indonesia (secara khusus) dan mancanegara (universal). Sehingga dengan melaksanakan pendidikan dengan baik tampaknya ada reformasi karakter siswa dalam menanggapi permasalahan-permasalahan global citizen. Ada beberapa hal yang akan terjadi adalah, *pertama* pendidik merasa berhasil dengan pendidikan yang diajarkan apabila siswa memiliki jiwa Pancasila dan memiliki perpektif yang baik terhadap toleransi keberagama di Indonesia; *kedua*, pendidik merasakan keberhasilan dalam mendidik disebabkan siswa memiliki karakter Pancasila, yaitu mampu menerapkan nilai-nilai ketuhanan (sesuai dengan butir-butir Pancasila); *ketiga*, pendidik memiliki kebanggaan tersendiri apabila siswa memiliki kontribusi dalam memajukan perdamaian abadi di setiap lapisan masyarakat di Indonesia; *keempat*, pendidik merasakan bahwa penerapan proses pembelajaran di sekolah tidak sia-sia, melainkan ada hasil untuk menuju perubahan-perubahan tingkah laku siswa; *kelima*, pendidik sebaiknya menerapkan sikap menghargai siswa. Artinya bahwa seorang pendidik memiliki etika untuk mendidik dalam menghargai keberagaman siswa di dalam ruang belajar / lembaga pendidikan.

Setidaknya dari kelima hal ini mewakili hasil pendidikan yang disampaikan dan diterapkan oleh pendidik di dalam mewujudkan harapan, dan cita-cita bangsa Indonesia. selain itu, hal aspek ini dapat dirasakan oleh siswa.

PERUBAHAN SIKAP SISWA

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa peranan pendidik dalam mendidik memberikan hasil yang baik dalam global citizen. Hasil yang dapat

dihat adalah perubahan-perubahan karakter siswa dalam menanggapi pluralisme. Ada beberapa dampak dari pelaksanaan pendidikan, diantaranya: *pertama*, hilangnya sikap eksklusivisme di dalam diri setiap siswa. Eksklusivisme merupakan sikap tertutup terhadap etnis, suku, budaya, negara lain. Sikap ini lebih mengarah kepada diri sendiri dan kurangnya nilai solidaritas yang tinggi di tengah-tengah lingkungan (sekolah, lingkungan, masyarakat dan negara). Artinya adanya keterbukaan siswa dalam menerima pluralisme yang ada di Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk global citizen. Bagi sebagian orang hal ini juga mempengaruhi pembawaan setiap siswa. Ada yang pendiam bukan berarti eksklusif melainkan bawaan karakternya adalah pendiam. Tetapi hal ini terlihat apabila diajak bekerja sama dalam satu team, serta memberikan hasil kerja sama atau kontribusi di dalamnya;

kedua, siswa menjaga hubungan (relasi) antarpersonal. Pembentukan sikap ini searah dengan butir Pancasila di dalam point ketiga "Persatuan Indonesia" yang terus dijunjung tinggi demi melaksanakan keharmonisan dan kedamaian di tengah-tengah bangsa Indonesia. Relasi antar siswa terjalin dengan baik berdasarkan pembelajaran dan implementasi karakter pendidik di tengah-tengah lembaga pendidikan. Relasi adalah suatu hubungan timbal balik. Setiap siswa memiliki relasi dan kekerabatan yang dapat memajukan bangsa dengan kerja sama yang baik. Selain itu, dengan adanya relasi kemungkinan jiwa sosialnya siswa dapat tertanam secara baik dikarenakan hidup bersosial setiap siswa terus diintegrasikan dengan baik di dalam setiap aspek kehidupan. Hubungan sosial tampaknya akan mengurangi rasa curiga yang mendalam karena hidup berdampingan dan terus membentuk kesatuan bangsa melalui sosial yang ada; *ketiga*, dengan penanaman nilai-nilai Pancasila maka siswa memiliki penilaian yang "objektif" artinya bahwa siswa tidak melihat perbedaan berdasarkan subjektifitas karena pluralisme dan keberagaman yang ada. Sikap objektif ini timbul di dalam pola pemahaman siswa dengan tidak melihat perbedaan itu sebuah masalah tetapi melihat bahwa "justu di dalam perbedaan itulah terdapat kesatuan dan

persatuan” karena jika tidak ada perbedaan mana bisa memperlihatkan sikap objektif dalam menilai dan melihat keberagaman yang ada. Sikap inilah yang harus dikembangkan dan terus ditanamkan di dalam diri siswa. Tujuannya siswa memperoleh hasil penilaian yang baik terhadap orang lain. Artinya bahwa siswa melihat sesama sebagai rekan, saudara dan team dalam memajukan bangsa Indonesia. Sehingga di dalam hasil yang diperoleh nara didik terus berupaya dalam menjaga rasa persaudaraan. Tidak memandang sesama sebagai lawan karena adanya perbedaan melainkan sebagai *team* yang mampu bersatu mengerjakan pembangunan bangsa, perubahan bangsa dan kerja sama di dalam berbagai aspek yang ada di Indonesia;

keempat, bertumbuhnya sikap solidaritas yang tinggi. Untuk melihat hasil ini maka melihat kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila. Sikap solidaritas terwujud apabila pendidik mengarahkan dan memacu para siswa di dalam sekolah untuk memiliki rasa solidaritas. Tujuannya adalah untuk mampu meningkatkan sikap secara kolektif. Kolektif yang dimaksudkan adalah siswa mampu secara bersama memperbaiki Indonesia di dalam kekurangan dan keterbatasan yang ada. Khususnya di dalam aspek pendidikan, sangat diperlukan peranan siswa kelak untuk mendidik angkatan yang kemudian dengan sikap yang bersolidaritas. Faedah yang diperoleh adalah siswa mampu meningkatkan sikap solidaritas yang berwawasan dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. **Kelima**, siswa “bijak” dalam menghargai perbedaan yang ada. Sikap bijak adalah mempergunakan akal budinya dengan sehat untuk memecahkan permasalahan yang ada di tengah-tengah bangsa. Artinya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, siswa mampu menginterpretasikan hasil pengetahuannya untuk membangun bangsa Indonesia. Dengan pengajaran yang diperoleh secara benar maka siswa mampu melaksanakan kebijakan (sebagai generasi) sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. **Keenam**, siswa memiliki mutu dan kualitas yang baik demi bangsa dan global citizen. Mutu dan kualitas yang baik adalah baik secara jasmani maupun di dalam aspek spiritualitasnya. Karena ada salah satu semboyan mengatakan bahwa *Mens sana*

in Corpore Sano “ sebuah pikiran yang sehat pada tubuh yang sehat” artinya istilah ini sebenarnya dapat dipergunakan di dalam pendidikan bahwa orang yang memiliki pikiran yang sehat tentu tindakannya juga sehat. Inilah merupakan perwujudan karakter siswa yang terimplementasi di dalam pembentukan global citizen.

KESIMPULAN

Sikap etis pendidik kepada siswa dalam membentuk global citizen berdasarkan pancasila merupakan fokus utama adalah pendidik yang harus menerapkan nilai-nilai etis berdasarkan Pancasila agar menghasilkan siswa sebagai generasi yang menghargai perbedaan yang ada di negara Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang pendidik tidak hanya berfokus kepada profesi yang diemban saja melainkan memperlihatkan sikap untuk bertoleransi di lembaga pendidikan, lingkungan, kelas dan masyarakat sekitar. Sehingga sikap etis yang dimiliki oleh pendidik dapat teraplikasikan di hadapan siswa dan lingkungan sekitar. Pentingnya peranan pendidik dalam mengubah pola pikir siswa dengan kembali melihat bahwa Indonesia memiliki keberagaman (pluralis) yang ada sehingga sebagai warga negara menciptakan perdamaian di tengah-tengah bangsa dan negara.

Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia – setiap lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai etis berdasarkan butir-butir yang terdapat di dalam Pancasila. Tujuan adalah membawa siswa sebagai generasi kelak untuk melihat dan mempertimbangkan semua permasalahan dengan baik tanpa harus melihat suku, budaya dan bahasa. Tetapi melihat secara masif bahwa Indonesia itu unik dan bervariasi. Sehingga hal ini dapat dilihat sebagai satu kesatuan yang memiliki seni yang memberikan keindahan bagi sesama dan bangsa lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bafadal, Ibrahim. 2004 *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
2. Banks, J.A. 2008. *Diversity Group Identity, and Citizenship Education in A Global Age* dalam

- Education Research.
3. BBC.Com 2018 di akses tanggal 16 April 2018 pukul 00: 28 WIB dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160222_indonesia_intoleransi
 4. Borrong, Eobert P. 2011 *Panorama Etika Praktis*, Jakarta: UPI STT Jakarta.
 5. CNN.com 2018 Diakses tanggal 15 April 2018, Pukul 13.32 WIB dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180222171557-20-278118/komnas-ham-intoleransi-mulai-mengakar-ke-anak-anak>.
 6. Cogan, J.J. 1998 *Citizenship Education for The 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page Limited.
 7. Darmaputera, Eka. 2016 *Etika Sederhan Untuk Semua Bisnis, Ekonomi dan Penatalayanan*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
 8. Detik.com 2018 di akses tanggal 16 April 2018, 00: 28 WIB dari <https://news.detik.com/berita/d-3863511/intoleransi-tak-ada-ruang-tapi-terus-berulang>
 9. Dower, N. 2010. *The Idea of Global Citizenship A Sympathetic Assessment Global Society*, 14
 10. Farr, R. 1984. *Reading: Trens an Chalelenges*. Washington D.C: National Education Association.
 11. Kristiawan, Muhammad. 2015 *Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Sumber Daya Indonesia yang Pandai dan Berakhlak Mulia*. Ta'dib, Vol. 18, No. 1.
 12. _____ 2017. *Strategi Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter bagi Siswa dengan mengamakan Peran Orangtua*. Jurnal Managemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, Vol. 2. No. 2, Juli- Desember.
 13. Lillie, William 1996 *An Introduction to Ethics*. New York: Barnes and Nobles
 14. Kompas.com 2018 *Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak di Jawa Barat*. diakses tanggal 16 April 2018, Pukul 14.20 WIB dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/18233341/tahun-2017-pelanggaran-kebebasan-beragama-terbanyak-di-jawa-barat>.
 15. Morais, D., & Ogden, A. 2010 *Initial Development And Validation Of The Global Citizenship Scale*. *Journal of Studies in International Education*, 20.
 16. Mulyasa, E. 2008 *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
 17. Nasution, Adnan Buyung. 1993 *Kendala dan Peluang Implementasi Pasal 27 dan 28 UUD 1945 di Era Mendatang*. Jakarta
 18. Pidarta, Made. 2013 *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Raneka Cipta.
 19. Seda, F.S. dan Manan, 2011 *Nasionalisme di Indonesia dan Ketahanan Budaya*. Jakarta: LIPI Press.
 20. Sidjabat, B.S. 2009 *Mengajar Secara Profesional*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup.
 21. Sinamo, Jansen. *8 Ethos Kerja Profesionalisme*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
 22. Sunoto. 1991 *Mengenal Filsafat Pancasila 1 (Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan Etika) Vol. 3*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya
 23. Winarno, 2007 *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 3*. Jakarta: Bumi Aksara.
 24. Woltersoff, Nicholas P. 2010 *Mendidik Untuk Kehidupan (Education For Life)*. Surabaya: Momentum.
 25. Zacky Ar, Akhmad 2016 *Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi Dan Pengembangan Kode Etik Guru Di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan*. DOI: <http://dx.doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.271-292>.